



Analisis Ketahanan Sosial Masyarakat “Nusantara” Dalam Pembangunan Ibukota Negara

Annisa Valentina^{1*}, Marisa Elsera²

^{1&2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji,

*email : nisavalen26@gmail.com

Abstract: *The development of New State Capital (IKN), "Nusantara", has been in progress and urgently needs more facilities to support its development like Jakarta, the capital of Indonesia. The development would bring more heterogeneity of community after movement which may lead to social conflict. The purpose of this study is mapping the condition of social resilience in the "Nusantara" community and to examine the supporting and inhibiting factors for the development of social resilience. The approach applied in this article was a qualitative literature study, by examining the text from online news. The object of this study was development of IKN and its impact in social resilience. Data were collected through online assessments. After that, data were sorted, categorized, and analyzed. The results of the study show that the social resilience of local people is still weak; great effort is needed to strengthen local people's resilience too increase ability of them to face challenges in the IKN.*

Keywords: *Development; Social Resilience; IKN; Nusantara*

A. PENDAHULUAN

Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia secara resmi akan berpindah dari DKI Jakarta Kalimantan Timur yang dinamakan “Nusantara”. Hal ini ditandai dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi UU oleh DPR RI pada Sidang Paripurna DPR RI yang dilakukan pada 18 Januari 2022. Perpindahan ibukota negara Indonesia ini telah menjadi pembicaraan yang ramai di ruang publik. Pemandangan IKN menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak mulai dari pemilihan lokasi IKN hingga pengesahan UU yang dinilai terburu-buru. Sementara pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sendiri dilakukan berdasarkan adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta. Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman kolonial (Anam, 2022).

Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan rencana pemindahan ibukota negara ini. Ketika memasuki semester II tahun 2022 lalu, pembangunan infrastruktur dasar akan semakin terlihat, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar (Qothrunnada, 2022). Sebelumnya, terdapat Program *food estate* (lumbung pangan) di Kalimantan melalui pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan di Indonesia (Lumanauw, 2020). Hal tersebut menjadi upaya pemerintah dalam mengimplementasikan rencana pembangunan

IKN agar siap menjadi berbagai pusat kegiatan negeri ini khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan sendiri merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya mengupayakan terbangunnya infrastruktur di IKN.

Selain harus fokus pada infrastruktur, pemerintah seharusnya meletakkan upayanya pada pembangunan masyarakat sebagai bagian dari sumber daya sekaligus salah satu aktor dari pembangunan (Adon nasrulloh, 2017). Sebagai dampak dari pembangunan yang bisa muncul. masalah sosial menjadi suatu keniscayaan yang muncul akibat berbagai kebijakan pemerintah serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Hal tersebut berupa berbagai masalah sosial ekonomi yang muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat karena menjadi perubahan sosial yang terjadi akibat pembangunan di suatu masyarakat. Masalah sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan (Lesmana & Wibowo, 2021).

Konsep ketahanan menyangkut ketahanan keamanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sosial menghadapi kondisi darurat, misalnya dampak bencana alam. Pada berbagai aspek tersebut, makna ketahanan telah ditelaah dari perspektif permasalahan dan kebutuhan yang langsung dihadapi masyarakat saat ini. Kajian-kajian mengenai ketahanan sosial secara khusus mengarah pada upaya-upaya advokasi untuk penguatan kapasitas institusi masyarakat (Suwignyo & Yuliantri, 2018). Ketahanan sosial juga dimaknai sebagai kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi yang menunjukkan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada konteks IKN Nusantara, pembangunan ketahanan sosial perlu dilakukan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk mampu mengatasi berbagai risiko yang terjadi akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Melalui menyimak media yang memuat berbagai informasi mengenai pembangunan rencana ibukota baru Indonesia, ketahanan sosial merupakan hal harus diperhatikan khususnya berkenaan dengan kesiapan IKN Nusantara menyambut migrasi ke dalam ibu kota baru.

Tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana pembangunan ketahanan sosial (*social resilience*) di wilayah IKN Nusantara serta memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk mengambil pelajaran dari hasil penelitian yang

didapatkan sehingga pertanyaan yang muncul menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana ketahanan sosial masyarakat IKN “Nusantara” serta upaya pembangunannya?

B. METODE

Penelitian ini bertumpu pada analisis berita dan opini dari media online. Tulisan ini melakukan eksplorasi media online yang berisikan berita mengenai ibukota baru (IKN) di Kalimantan Timur yang dipublikasikan sejak tahun 2021 dan artikel jurnal dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Eksplorasi berita dilakukan dengan menggunakan media online dalam negeri yang kredibel. Unit analisis yang diterapkan adalah untuk mengidentifikasi ketahanan sosial dari berbagai media online yang telah meliput di wilayah IKN. Setelah itu, temuan dipelajari dalam konteks pembangunan sosial budaya. Tahapan dalam penelitian ini adalah a) Melakukan observasi pada media online serta jurnal yang membahas mengenai IKN, b) Mengerucutkan data pada beberapa sumber seperti CNBC, Jurnal, dl., c) mengerucutkan topik pada pembahasan mengenai ketahanan sosial masyarakat IKN seperti d) Melakukan analisis data e) Menyusun laporan penelitian

C. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan

Pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Pembangunan pada dasarnya tidak dapat berhenti ataupun dihentikan karena faktanya, manusia dengan hidupnya yang dinamis selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti dari pembangunan bukanlah pada hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, namun juga menyangkut pada perubahan sikap dari masyarakat sehingga pembangunan harus memiliki kemampuan untuk membawa umat manusia melampaui pengutamaan pada aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari (Nain, 2019). Pembangunan juga berarti usaha usaha yang dilakukan manusia yang telah mengalami sistematisasi dengan tujuan untuk mengarahkan perubahan sosial beserta kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu untuk bisa mencapai pertumbuhan dari peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan (Dewi, 2017).

Pembangunan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai perbaikan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya hingga politik. Pembangunan tidak dapat diberhentikan atau berhenti secara sendirinya, karena kehidupan manusia selalu dipenuhi oleh perubahan. Pembangunan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat tidak hanya mengenai perubahan struktur fisik maupun material. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut tidak saja hanya mementingkan pembangunan fisik yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah, namun diperlukan juga pembangunan manusia. Pembangunan manusia bertujuan agar manusia mampu dan berdaya untuk memanfaatkan seluruh potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi keuangan, modal sosial, dan lain-lain (Sumodiningrat dalam Suri, 2019).

Program pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, rasional, efektif, dan efisien, yang sasaran utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan

sosial bagi seluruh rakyat atau manusia Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagi Negara Republik Indonesia yang mengisyaratkan bahwa untuk terwujudnya kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah melalui usaha pembangunan sosial. Pembangunan seharusnya selain berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pada terbentuknya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial (Adon nasrulloh, 2017). Fondasi moral dari kebijakan pembangunan ekonomi harus dapat memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, strategi, dan program terhadap ketahanan sosial sangat penting karena ketahanan sosial merupakan salah satu pilar dari keberhasilan pembangunan negara. Kualitas ketahanan sosial masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat melalui hubungan sosial, pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, dan penguatan modal atau potensi lainnya. Untuk mengukur ketahanan sosial di suatu wilayah dapat menggunakan metode yang dikemukakan Sakdapolrak, yaitu pengukuran ketahanan sosial berupa potensi yang dimiliki, meliputi modal alam, modal sosial, modal politik, modal ekonomi (sumber keuangan), modal fisik dan modal manusia (Ghafur, 2016)

Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial secara konseptual didefinisikan sebagai kemampuan individu dan kelompok untuk secara tepat waktu bertindak ketika keadaan stabil dan segera beradaptasi, mengatur diri dan tetap aktif terlibat dalam merespons kondisi yang tak menentu seperti yang dikatakan oleh Leitch pada 2017. Konsep tersebut mengandung tiga dimensi pokok, yaitu kemampuan atau kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola persoalan (*coping capacities*), kemampuan untuk menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu (*adaptive capacities*), dan kemampuan berubah menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah (*transformative capacities*). Keck dan Sakdapolrak (2013) menyatakan bahwa hampir semua definisi ketahanan sosial menekankan kepedulian terhadap entitas sosial (baik sebagai individu, organisasi, maupun komunitas) dan kemampuannya atau kapasitasnya untuk mentolerir, menyerap, mengatasi, dan menyesuaikan diri dari berbagai jenis ancaman lingkungan dan sosial. Hampir semua definisi ketahanan sosial menekankan kepedulian terhadap entitas sosial (baik sebagai individu, organisasi, maupun komunitas) dan kemampuannya atau kapasitasnya untuk mentolerir, menyerap, mengatasi, dan menyesuaikan diri dari berbagai jenis ancaman lingkungan dan sosial. Ketahanan sosial memiliki potensi menjadi kerangka kerja analitis yang koheren yang dapat membangun pengetahuan ilmiah dari konsep kerentanan sosial, juga menawarkan perspektif baru pada tantangan perubahan global yang sekarang sedang dihadapi (Padmiati, 2013).

Ketahanan sosial masyarakat akan tercipta bilamana suatu kondisi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membentuk sistem pengembangan sosial dan adaptasi sosial, sehingga berkemampuan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial dalam pembangunan sosial. Selain itu, ketahanan sosial juga mengandung pengertian yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik sehingga ketahanan sosial mengandung arti

kemampuan untuk mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan (Suwignyo & Yuliantri, 2018).

Perlu diketahui, ketahanan sosial bukanlah merupakan suatu *finish product*, namun justru sebagai suatu proses dan dinamika dalam masyarakat. Kemampuan ini yang sejalan dan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Kemampuan-kemampuan dalam ketahanan sosial masyarakat akan meningkatkan kewaspadaan nasional, karena pada dasarnya kewaspadaan nasional merupakan rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman yang unsur kewaspadaan nasional ini juga terdapat dalam ketahanan sosial (Afrizal & Handrisal, 2019).

Ketahanan sosial masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang memiliki dua dimensi makna, yaitu ketahanan sosial dalam pengertian alat atau metode, dan ketahanan sosial dalam pengertian tujuan. Ketahanan sosial masyarakat sebagai metode atau alat, merupakan suatu rumusan dan model pendekatan ketahanan sosial yang dapat memberikan berbagai *input* dan *output* bagi upaya terciptanya suatu kondisi masyarakat yang berkemampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, serta masyarakat yang memiliki suatu daya tahan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi. Sedangkan ketahanan sosial sebagai tujuan (*goal*) merupakan harapan-harapan ideal yang dapat diwujudkan dengan menggunakan cara atau metode, sehingga masyarakat menjadi dinamis, berkemampuan, memiliki daya tahan, memiliki daya juang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial, baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat (Sarjono, 2019).

Ibukota Negara "Nusantara"

Indonesia akan memiliki ibu kota baru. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta izin untuk memindahkan IKN atau Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dalam pidato Kenegaraan Presiden RI pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74. Selain itu, Pulau Kalimantan dipilih pemerintah sebagai Ibu Kota Negara yang akan menjadi penggerak ekonomi masa depan dan mendukung tercapainya Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045. Pindahan IKN ke Kalimantan Timur ini menjadi salah satu bentuk upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. (Chandra Gian Asmara, 2019)

Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Sebutan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibukota Nusantara diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.

Terdapat tiga tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Pembangunan IKN, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045 (mth, n.d.). Kalimantan Timur sejak dulu telah memiliki struktur sosial yang beragam. Sekitar 1,5 juta pendatang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI beserta keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah IKN. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang “*Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable*” (Kementerian_PPN/Bappenas, 2020).

Pada 2018, jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 3,6 juta jiwa diproyeksikan akan meningkat menjadi 5-7 juta jiwa di 2025, kemudian 8,7-9,7 juta jiwa di 2035, dan mencapai 10-11 juta jiwa di 2045. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak hanya mengembangkan wilayah IKN saja, tetapi juga wilayah sekitarnya. pemerintah memastikan pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya berimbang tidak hanya membuat IKN menjadi *enclaved*, sementara wilayah sekitarnya tidak berkembang atau didiamkan secara alami. Terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN, mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi, ini yang akan kita kembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi, masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021, 2021).

Dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN di mana sektor penyerapan tenaga kerja terbesar adalah perdagangan dan pertanian, tetapi penciptaan kesempatan kerja terbesar terjadi di sektor jasa pendidikan dan baru disusul perdagangan. Perbedaan karakteristik sosial budaya antara masyarakat setempat dan pendatang perlu diantisipasi sejak awal dan ketahanan masyarakat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud.

Beberapa aspek yang mempengaruhi jangka waktu pemindahan ibu kota negara adalah:

- a. Dukungan dan niat politik dari para pemangku kepentingan, sehingga dalam beberapa kasus, pengembangan ibu kota baru menjadi berlarut-larut.
- b. Aspek eksternal yang mempengaruhi implementasi perencanaan, seperti kasus depresi ekonomi di Canberra dan perang sipil Amerika di Washington DC.
- c. Hambatan fisik antara lokasi ibu kota baru dengan pusat ekonomi eksisting. Kondisi ini terjadi di Washington DC., Canberra, dan Brasilia. Contoh kasus dengan jangka waktu yang paling singkat di Putrajaya terjadi karena lokasi yang berdekatan dengan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota lama sekaligus pusat ekonomi negara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Sosial Masyarakat Nusantara

Untuk mempertahankan konsistensi dan kualitas identitas suatu daerah, perlu adanya dukungan dari dalam yang berasal dari masyarakat daerah tersebut. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat dalam menjalin hubungan yang baik di dalamnya, dapat mempengaruhi ketahanan sosial mereka, sehingga kerjasama dalam bidang apapun, terutama mempertahankan identitasnya (dalam bahasan ini budaya Marga Melinting) dapat dilakukan dengan mudah. (Astin Damayanti, Bartoven Vivit Nurdin, Agung Cahyo Nugroho, 2019).

Indikator dari ketahanan sosial dalam hal ini konteks yang dilihat adalah masyarakat Kalimantan Timur di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah:

a. Intensitas dan Kemampuan menangani konflik

Hingga Desember 2019, di Kalimantan Timur khususnya beberapa kabupaten terjadi kasus gangguan usaha perkebunan (GUP) sebanyak 47 kasus atau konflik pada 35 perusahaan dimana 62 persen konflik lahan dan non lahan sekitar 38 persen. Pada tahun 2020 dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik. Persentase desa atau kelurahan di Kalimantan Timur yang mengalami konflik massal sebesar 1,64% atau peringkat 10 terendah di Indonesia. Adapun jumlah konflik massal yang terjadi di Kalimantan Timur sebanyak 17 kejadian. Jenis konflik massal meliputi perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar desa/kelurahan, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar, dan perkelahian antar suku. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berhasil memetakan lima daerah rawan konflik sosial meliputi Samarinda, Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat. Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Timur sangat kompleks dan dinamis, yang disebabkan antara lain karena permasalahan politik (masalah pemilihan, kebijakan pemerintah yang tidak populer, dll), ekonomi (sumber daya ekonomi, letak geografis, dll), sosial (SARA) dan budaya (tradisi dan adat istiadat) (Dinsos Kalimantan Timur: 2014).

Secara umum akar konflik yang terjadi adalah masalah kesenjangan ekonomi. Namun isu ekonomi ini kemudian berkembang menjadi isu etnis, isu agama, isu penduduk lokal versus pendatang. Kenyataan bahwa Kalimantan Timur merupakan wilayah yang mempunyai sumber ekonomi yang sangat potensial menyebabkan arus pendatang terutama dari Sulawesi, Kalimantan Selatan dan Jawa sulit untuk dibendung. Akhirnya, faktor ini menambah kerumitan penyelesaian konflik sosial yang merambat ke masalah etnis, agama dan pribumi versus pendatang ini.

Kecenderungan konflik yang berulang dari waktu ke waktu menyebabkan Pemerintah Kalimantan Timur dari tingkat provinsi hingga daerah bersama-sama masyarakat bahu membahu bekerja sama untuk menangani masalah ini. Dilibatkannya seluruh unsur masyarakat dalam penanganan konflik menjadi cara yang dipandang cukup efektif mengendalikan dan meredam konflik sehingga tidak menimbulkan bencana sosial yang berdampak umum dan sistemik terhadap masyarakat Kalimantan Timur. Pola penanganan konflik sosial yang dijalankan oleh

Pemerintah Kalimantan Timur ini kemudian dijadikan percontohan nasional dan dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri (ANTARA Kalimantan Timur, 2013). Dalam penanganan konflik sosial ini, kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota antara lain seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan Resort, dan Satuan-Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan unsur-unsur masyarakat menjadi hal utama.

Pelibatan seluruh unsur masyarakat dalam penanganan konflik sosial ini diformalkan dengan dibentuknya beberapa forum kemasyarakatan sebagai wadah atau media yang menjembatani, memediasi dan memfasilitasi komunikasi dan dialog di agar tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Untuk memperkuat keberadaan forum-forum tersebut dan memberi dasar hukum yang pasti, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten membuat Surat Keputusan pendirian forum-forum tersebut yang juga merupakan turunan dan terjemahan dari peraturan nasional.

b. Kemiskinan

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur menurut BPS Per September 2020 – Maret 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
September 2020	128,11	5,10
Maret 2021	127,28	5,01
Perdesaan		
September 2020	115,88	9,98
Maret 2021	114,48	9,87
Perkotaan+Perdesaan		
September 2020	243,99	6,64
Maret 2021	241,77	6,54

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2020 dan Maret 2021

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada Maret 2021 sebanyak 241,77 ribu (6,54 persen). Pada September 2020 sebanyak 243,99 ribu (6,64 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 2,22 ribu orang (secara persentase turun 0,10 persen poin). Selama September 2020 – Maret 2021, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 2,90 persen, yaitu dari Rp. 669.622,- per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp. 689.035,- per kapita per bulan pada Maret 2021. Periode September 2020 – Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,031 pada keadaan September 2020 menjadi 1,223 pada keadaan Maret 2021. Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik dari 0,293 menjadi 0,337 pada periode yang sama.

Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,334. Angka ini mengalami penurunan

0,001 jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,335. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 20,50 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Angka ini naik sebesar 0,17 persen poin dibandingkan angka September 2020.

c. Kearifan Lokal, Nilai dan Norma

Masyarakat lokal, masyarakat Dayak Kalimantan Timur memiliki cara sendiri dalam memelihara tanah dan sumber daya alam lebih baik, karena masyarakat setempat hidup di situ, menjadi saksi atas keberadaan alam tersebut. Nilai kearifan lokal telah membangun perilaku dalam menjaga lingkungan hutan lebih baik dari komunitas yang lain. Nilai dan etika leluhur tentang bagaimana selayaknya memperlakukan alam dan berhubungan dengan alam sudah ada sejak dulu. Sebagai nilai yang mendasari kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Relasi manusia dengan hutan pada masyarakat lokal misalnya merupakan hubungan fungsional sosial. Ada beberapa hal yang mendasar terkait dengan relevansi kearifan lokal dan dinamika perilaku ekologis masyarakat Dayak Benuaq dalam mengelola lingkungan hutan. Kepercayaan yang ada di masyarakat Benuaq memandang hutan dan sungai sebagai "tetangga" yang merupakan tempat roh leluhur tinggal sehingga keeratn hubungan yang selaras antara manusia dengan hutan dan sungai adalah penting. Ada dewa penjaga hutan dan yang memberikan hutan pada mereka, sehingga berakibat buruk jika seseorang menyakiti hutan. Sebaliknya hutan akan memberikan kebaikan jika manusia menjaga hutan terutama spesies tertentu dengan baik pula. Nilai (value) tentang hutan dan sungai didasarkan atas fungsi hutan dan sungai dalam menjaga kualitas hidup masyarakat dalam bertahan hidup (survival), keberlanjutan tersedianya sumber daya (sustainable), fungsinya sebagai tempat aktivitas spiritual dan perekat sosial. Hutan tidak dinilai dari nilai keuntungan ekonomis saja, karena itu hutan dianggap bukanlah komoditas tapi merupakan bagian integral dari siklus hidup mereka. Karakteristik hutan tropis Kalimantan dahulu menurut para tetua, memiliki vegetasi yang rapat dan bervariasi dengan sungai-sungai yang melintasi pulau ini. Menurut sebagian besar narasumber menyatakan bahwa keberadaan kebudayaan Dayak Benuaq setidaknya sangat dekat dengan irama kehidupan hutan dan sungai dan erat kaitannya dengan kayu Ulin. Selain keyakinan bahwa kayu ulin merupakan vegetasi yang baik bagi resapan air di hutan.

Selain itu, terdapat kearifan lokal yang ada dalam kehidupan nelayan di bantaran Sungai Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yaitu Tradisi Beleongan. Tradisi Beleongan dilakukan dengan menebar jala secara berurutan dan bersamaan sesuai komando atau aba-aba yang diberikan oleh seseorang yang ditunjuk sebagai pimpinan beleongan. Peserta beleongan sedikitnya harus 10 orang, 5 orang di kiri dan 5 lainnya di sebelah kanan dari alur yang biasa dilalui ikan. Dengan demikian ikan terkepung dan tetap berada ditengah alur. Jika anggota beleongan lebih dari 10 itu lebih baik karena hasil tangkapan ikan tentunya akan lebih banyak lagi. Hasil akhir tradisi beleongan ini berupa ikan akan dibagi rata kepada setiap anggota, kecuali untuk pimpinan beleongan jumlahnya lebih dari rata-rata diterima anggota. Karena dia mampu menduga kapan ikan berkumpul dan saat bersamaan memberikan aba-aba agar jala segera ditebar. Tradisi ini dilakukan sebagai upaya nelayan dalam menangkap ikan secara efektif dan efisien, namun memberikan hasil berupa ikan yang diperoleh

dalam jumlah yang lebih banyak.

d. Kemampuan untuk Mengelola Sumberdaya Alam, Perbedaan, Kepentingan Dan Konflik

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua Kabupaten/Kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam. (*Wikipedia*). Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan . Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 22,98 juta Ha dengan luas wilayah daratan ±19,85 juta Ha dan luas pengelolaan laut sejauh 4 - 12 mill dari panjang garis pantai ± 3,13 juta Ha. Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga,yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur , dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).

Tabel 2 Potensi Energi Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur

No	Bentuk Energi	Cadangan	Produksi
1	Gas Bumi	24,58 TSCF (24,8% nasional)	1,98 TSCF (37% nasional)
2.	Batubara	7,798 miliar ton	148 juta ton (60% nasional)
3	Minyak Bumi	745,75 MMSTB (11% nasional)	57 MMSTB (6,1% nasional)

Sumber: Factsheet Kalimantan Timur (Indonesia, 2014)

Secara geografis Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 20,8 juta ha dan berlokasi di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan luas wilayah yang mencapai sekitar 1,5 kali pulau Jawa dan Madura, Kalimantan Timur hanya dihuni sekitar 3,7 juta penduduk, maka akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kalimantan Timur pada tahun 2011 merupakan Provinsi dengan nilai PDRB terbesar ke 6 di Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Riau. Dengan nilai PDRB tersebut, Kalimantan Timur berkontribusi sekitar 67,9% dari PDRB Regional Kalimantan dan 36,85% terhadap PDRB Regional Indonesia Timur. Secara nasional Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan PDRB Perkapita terbesar se Indonesia yakni Rp.105,8 juta. Regional produk tahun 2011 Rp. 390,64 Trilliun, 50,29% ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan 23,36%. Sementara kedua sektor ini merupakan sector yang tidak dapat diperbaharui dan pada suatu saat akan habis. Sedangkan PDRB Triwulan III tahun 2012 sebesar Rp. 321,77 Trilliun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memilih strategi untuk menggeser struktur ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ke pembangunan ekonomi yang berbasis *renewable resources*, dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir bahan jadi/olahan (*final/processed product*) yang berdaya saing (*competitiveness*), memiliki nilai tambah (*value added*) dan mampu memberikan multiplier effects yang lebih signifikan bagi kesejahteraan rakyat dan berkelanjutan (*sustainable wealth*).

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam era reformasi sekarang ini Pemerintah Daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan daerah. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Kemampuan masyarakat dalam memfungsikan modal sosial

Masyarakat Suku Paser mempraktikkan hidup bergotong royong dalam aktivitas berladang yang telah dilakukan secara turun temurun. Secara berkelompok mereka memilih dan membuka lahan di area yang sama atau lokasi yang saling berdekatan. Pilihan akan area ladang yang saling berdekatan bertujuan untuk menekan atau mengurangi risiko tanaman padi dari serangan hama. Di sisi lain, cara tersebut dipilih agar memudahkan dalam memenuhi kebutuhan atau pengorganisasian tenaga kerja yang terbatas. Sistem gotong royong digunakan dalam melakukan persiapan lahan hingga lahan siap ditanami, penyemaian bibit, pemeliharaan, serta pemanenan hasil. Tidak dikenal sistem upah dalam kegiatan tersebut. Kondisi alam dan keterbatasan tenaga kerja mengkondisikan para peladang menginternalisasi nilai gotong royong dalam kehidupannya. Dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu, misalnya madu, masyarakat Suku Paser juga menjunjung tinggi nilai kerjasama dan kebersamaan. Pemetikan madu dilakukan secara kolektif antar anggota masyarakat dengan cara pergi ke hutan secara bersama-sama, selanjutnya hasil madu dibagi rata ke semua anggota yang ikut serta dalam pemanenan.

f. Kepercayaan

Secara keseluruhan tingkatan unsur kepercayaan dari setiap desa kajian berada pada tingkatan sedang kecuali desa Karang sari yang berada pada tingkatan kuat (Tabel 5). Analisis terhadap dua belas sub unsur kepercayaan diperoleh hasil, bahwa semua desa kajian memiliki tingkat kepercayaan yang kuat, terhadap sesama warga dalam satu desa, terhadap tokoh masyarakatnya (tokoh agama, tokoh adat) dan terhadap lembaga pemerintah (perangkat desa, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai/BTNGC, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan) kecuali Desa Gunung Sirah yang berada pada tingkat lemah untuk kepercayaan terhadap perangkat desa, dan Desa Cisantana yang berada pada tingkat sedang untuk kepercayaan terhadap BTNGC dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan temuan di atas terlihat bahwa Kalimantan Timur sebagai konteks dari tulisan mengenai Ibukota Nusantara (IKN) yang masih sudah memadai di wilayah IKN dapat dilihat dari kondisi indikator ketahanan sosial, terutama kondisi kemiskinan dan infrastruktur yang cukup memadai dan masih terus dilakukan. Hal itu tidak lepas dari pengelolaan potensi sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang belum dilakukan secara optimal dan kerap terjadi tarik menarik kepentingan berbagai pihak. Masih adanya kebijakan yang tidak mendukung satu sama lain, dalam arti kurangnya koordinasi antar lembaga dan institusi sehingga pengelolaan wilayah IKN masih belum optimal. Kecenderungan seperti ini dapat menimbulkan kerentanan, baik secara sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang, terutama di tengah pembangunan IKN sendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus dalam menangani persoalan di wilayah IKN sehingga pengelolaan potensi yang ada dapat optimal. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan wilayah IKN, di antaranya adalah melalui pemberdayaan pembangunan yang terintegrasi dan optimalisasi kerja sama. Pemberdayaan pembangunan yang terintegrasi dapat diartikan sebagai upaya membangun suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai potensi atau aset, seperti potensi alam, sosial, kelembagaan, teknologi maupun prasarana yang ada secara efektif, optimal, dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan produktif, seperti mendorong ekspor ekonomi masyarakat hingga memetakan konflik yang ada dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat membantu peningkatan potensi ketahanan sosial masyarakat di wilayah IKN, terutama dari aspek sosial kemasyarakatan dengan semakin kuatnya hubungan masyarakat kedua negara, selain itu, dalam aspek ekonomi, kerja sama lintas batas juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemahaman ketahanan sosial lebih lanjut menegaskan bahwa, ketahanan sosial masyarakat adalah kemampuan komunitas atau lembaga sosial dalam memfungsikan modal sosial, sehingga mampu melindungi secara efektif anggotanya, termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan, dan mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan. Dengan demikian, ketahanan sosial masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang memiliki dua dimensi makna, yaitu ketahanan sosial dalam pengertian alat atau metode, dan ketahanan sosial dalam pengertian tujuan. Ketahanan sosial masyarakat sebagai metode atau alat, merupakan suatu rumusan dan model pendekatan ketahanan sosial yang dapat memberikan berbagai *input* dan *output* bagi upaya terciptanya suatu kondisi masyarakat yang berkemampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, serta masyarakat yang memiliki suatu daya tahan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi. Sedangkan ketahanan sosial sebagai tujuan (*goal*) merupakan harapan-harapan ideal yang dapat diwujudkan dengan menggunakan cara atau metode, sehingga masyarakat menjadi dinamis, berkemampuan, memiliki daya tahan, memiliki daya juang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial, baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.

E. KESIMPULAN

Ketahanan Sosial di IKN tergolong rendah dikarenakan program pembangunan belum banyak menyentuh pada aspek yang sangat potensial sehingga menjadikan wilayah IKN masih memerlukan strategi pembangunan, terutama jika dibandingkan dengan wilayah Jakarta sebagai ibukota sebelumnya. Ibukota Negara “Nusantara” adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, daya alam hayati, maupun tambang. Namun, potensi kekayaan alam yang melimpah tampaknya belum dikelola secara optimal dan terintegritasi. Akibatnya, Selain itu, perlu pendekatan budaya mengingat terdapat banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat IKN.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada AAPSI sebagai penyelenggara kegiatan Konferensi Nasional Sosiologi IX “Pendekatan Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)” serta rekan-rekan Dosen Sosiologi FISIP UMRAH yang telah mendukung penulisan paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon nasrulloh. 2017. Sosiologi Pembangunan. In *Pustaka Setia Bandung*.
- Afrizal, & Handrisal. 2019. Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa E kang Anculai Kabupaten bintan. *Jurnal Wedana*, 1(1).Anam, K. (2022). Pro Kontra Ibu Kota Baru RI, Simak Perdebatan Ini! In *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220128201730-4-311394/pro-kontra-ibu-kota-baru-ri-simak-perdebatan-ini>
- Astin Damayanti, Bartoven Vivit Nurdin, Agung Cahyo Nugroho, D. H. (2019). Pengaruh Ketahanan Sosial Masyarakat Desa Wana dalam Ketahanan Identitasnya sebagai Desa Tradisional Astin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2(c), 163-168.
- Chandra Gian Asmara. 2019. Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Ini Pidato Lengkap Jokowi. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816114218-4-92474/ibu-kota-pindah-ke-kalimantan-ini-pidato-lengkap-jokowi>
- Dewi, S. 2017. *Perubahan sosial budaya transportasi air menjadi transportasi darat akibat pembangunan jalan: Studi deskriptif di Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators/Dewi=3ASielviana=3A=3A.html>
- Ghafur, M. F. 2016. Ketahanan Sosial Di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 233-248.
- Indonesia, S. E. 2014. *Factsheet*. Kementerian_PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Naskah Akademik.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021. 2021. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. *Kementerian PPN/Bappenas*, 2-24.
- Lesmana, D., & Wibowo, B. R. 2021). Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur (Studi

- Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon). *Jurnal Riset Pembangunan*, 3(2), 78–87. <https://doi.org/10.36087/jrp.v3i2.82>.
- Lumanauw, N. 2020. Jokowi: Food Estate Kalteng Untuk Antisipasi Krisis Pangan. *Investor.Id*. https://investor.id/Business/Jokowi-Food-Estate-Kalteng-Untuk-Antisipasi-Krisis-Pangan_mth. (n.d.). Undang-Undang Ibu Kota Negara Menandai Dimulainya Pembangunan IKN. *Kominfo.Go.Id*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/40069/undang-undang-ibu-kota-negara-menandai-dimulainya-pembangunan-ikn/0/artikel_gpr
- Nain, U. 2019. *Pembangunan Desa (P3Pd)*. 1–141.
- Padmiati, E. 2013. Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 263–275.
- Qothrunnada, K. 2022. Geliat Wajah IKN Nusantara Sudah Terlihat, Masyarakat Lokal Antusias. *Detikfinance*.
- Sarjono, F. 2019. Kata kunci ๓. *Kinabalu*, 11(2), 50–57.
- Suri, L. A. 2019. Pembangunan Obyek Wisata Berbasis Komunitas Lokal pada Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 5(2), 74–86. <https://doi.org/10.25077/jsa.5.2.74-86.2019>.
- Suwignyo, A., & Yuliantri, R. D. A. 2018. Praktik Kewargaan Sehari-hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950an: Sebuah Tinjauan Sejarah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1), 117. <https://doi.org/10.22146/jkn.31239>
- Roebyantho, Haryati & Ety Padmiati. 2007. Pemberdayaan Jaringan Pranata Sosial Dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*
- Sielviana, Dewi. 2017. Perubahan Sosial Budaya Transportasi Air Menjadi Transportasi Darat Akibat Pembangunan Jalan. Bandung: UIN SGD
- Sugiarto, Eddy Cahyono. 2022. IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru Dan Smart City. https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city (Diakses 19 Mei 2022).
- Sutrisno, Eri. 2022. IKN Nusantara Awal Peradaban Baru Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4274/ikn-nusantara-awal-peradaban-baru-indonesia?lang=1> (Diakses 19 Mei 2022).
- Utari, Enggar. Pengaruh Hutan Mangrove Terhadap Ketahanan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar. <https://kkp.go.id/Ditjaskel/Kajian-Komplementer>. (Diakses 19 Mei 2022).